

ISLAM, TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI DAN PUBLIC CIVILITY

Muhammad

STAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Email: abiulil@yahoo.com

Abstract

Debating the function and role of religion in public civility development that lately arise indicated the rise of awareness about the importance of religious values in the lives of individuals and the public sector. The role and function of religion sterilized from the public, especially in concerning to the political life, economic development and other public sectors. This article aims to provide elaboration of the discourse of religion in building public civility. The first part of this article presents the ontology of religion, its role and function in personal and public life. The second section presents the values of Islam in building public civility, which historically constructed from the experience of the early success of the Islamic struggle in building the ideal type of state in Madinah. Next section presents historical construction of economic development which was loaded with the values of public civility that ever be a reference of modern society in building their economic and monetary system. This article is discusses Islamic civility that taken from classical Islam. These experince are expected to become functional in realizing the hopes of the majority community to build public civility. Finally, this article closes with a conclusion that contains a general ideas that are offered in view of the relation of religion (Islam) in building public civility.

مستخلص

تميز النقاش حول وظيفة ودور الدين في الخطاب العام الكياسة التنمية التي تمسك في بعض الفترة الماضية ارتفاع الوعي حول أهمية التدخل القيم الدينية في حياة الأفراد والقطاع العام. خلال هذا الوقت، ودور ووظيفة الدين تعقيماً من الجمهور، وخصوصاً تلك التي ترتبط مع الحياة الوطنية، والتنمية الاقتصادية والقطاعات العامة الأخرى. هذا المقال يهدف إلى تقديم صياغة الخطاب الدين في بناء التمدن العامة. الجزء الأول من هذه المادة يعرض الأنطولوجيا الدين، ودور ووظيفة الدين في الحياة الشخصية والعامة. القسم الثاني يعرض قيم الإسلام في بناء الكياسة العامة التي انشئت من تجربة التاريخية من النجاح المبكر من الكفاح الاسلامي في

بناء النموذج المثالي للدولة في المدينة المنورة. المعلومات الواردة في بناء التنمية الاقتصادية التاريخية التي يتم تحميلها مع قيم التمدن العامة من أي وقت مضى أن نظام مرجعي للمجتمع الحديث في بناء النظام الاقتصادي والنقدي. يودع هذه المقالة أيضا التمدن الإسلامي ، والأمل في المستقبل من خلال عدد من القيم التي اتخذت من الإسلام التقليدي ، الذي من المتوقع أن تصبح وظيفية في تحقيق آمال المجتمع الأغلبية لبناء الكياسة العامة. في القسم الأخير من هذه المادة يغلط مع اختتام يحتوي على الأفكار العامة المجردة التي يتم تقديمها في ضوء العلاقة بين الدين (الإسلام) في بناء الكياسة العامة.

Keywords: Keadaban Publik, Islam Transformatif, Sekularisasi, Ekonomi

A. Pendahuluan

Berbagai pencapaian sebagai konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan para penghuni desa buana (*global village*) dengan mudah dan leluasa menikmati kemajuan-kemajuan spektakuler dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul. Jasa besar tersebut menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu karakteristik penting dari kemajuan peradaban manusia moderen.

Pada tahap awal perkembangannya, ilmu pengetahuan dan teknologi diyakini dapat melepaskan masyarakat dari kungkungan mitos yang bersumber dari dogma agama yang begitu dominan. Agama pada abad pertengahan dianggap sebagai candu yang tiada lain tujuannya untuk menjebak pemeluknya menjadi *loyal adherent*, tanpa mereka perlu mempertanyakan *reasoning* apa dan bagaimana serta mengapa dinamika dan perubahan itu terjadi. Mereka harus tunduk sepenuhnya pada otoritas agama. Alhasil keterbelakangan dan kemunduran serta stagnasi intelektual masyarakat Eropa terjadi. Pada saat yang sama terjadi pemisahan antara agama dengan ilmu pengetahuan serta agama dari pentas kehidupan politik (pengelolaan negara) atau lazim dikenal dengan sekularisasi.

Dalam teori sekularisasi diasumsikan bahwa pembangunan manusia dapat berkembang secara dramatis melalui proses peniadaan rintangan yang bernama

agama. Keyakinan ini mengantar para sosiolog dan para pemikir berkesimpulan bahwa Tuhan yang diusung agama hanya sebuah ilusi yang tak dapat dibuktikan bahkan Tuhan dianggap telah mati 'the death of God'.¹

Sekularisasi berlangsung di bagian dunia tertentu yang ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah pengunjung gereja, terutama di Eropa Timur. Meskipun demikian, sekularisasi tidak berarti hidup tanpa agama sama sekali melainkan agama bersifat *prive* disterilkan dari wilayah publik. Dahaga terhadap kebutuhan beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang. Nyatanya, masyarakat Eropa yang mendiskreditkan agama, terjebak dalam kehidupan materialistik dan individualistik tidak mampu menghadirkan makna bagi masyarakat Eropa. Perkembangan terkini menunjukkan abstraksi dan demontrasi wanita-wanita Eropa (London) yang haus dengan sinaran qalbu yang bersumber dari agama. Mereka menjadikan Islam sebagai *ending* pemuas dahaga spiritual mereka.²

Pembangunan tanpa intervensi agama diakui memang berhasil menghantar masyarakat moderen sukses meraih impian material dengan menepikan tujuan, cara dan nilai dari memperoleh materi. Padahal, nilai, terutama yang bersumber dari agama, menjadi fondasi dasar bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam membangun masyarakat yang memiliki keadaban. Nilai mendahului kewajiban dan berlaku sebagai dasar hukum moral.³

Masyarakat publik mengalami sindrom akibat disorientasi nilai. Pembangunan di Indonesia, misalnya didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral materialistik dan utility, sehingga bangsa ini dilandasi dekadensi moral serius, yang ditandai dengan merajalelanya budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penetapan berbagai kebijakan publik.

Fakta demikian seolah membenarkan teori sekularisme yang menempatkan agama sebagai sesuatu yang *prive* berlaku dalam masyarakat Indonesia yang

¹ Ko" se, A. (1999). The journey from the secular to the sacred: Experiences of native British converts to Islam. *Social Compass*, 46(3), hal. 301-312.

² Louise Soutar. British female converts to Islam: choosing Islam as a rejection of individualism. *Language and Intercultural Communication*. Vol. 10, No. 1, February 2010, 3-16.

³ Risieri Frondizi. *Filsafat Nilai*. Terj. Cut Ananta Wijaya (Yogyakarta: Pusaaka Pelajar, 2001), 112.

mayoritas masyarakatnya Muslim terbesar di dunia. Kekhawatiran atas fakta itu mengharuskan para stakeholders merevitalisasi peran agama dalam membangun keadaban publik (*public civility*), menjadikan agama sebagai sebuah kebutuhan yang memberikan efek positif dalam ruang publik, yang nilai-nilainya diharapkan menjadi sentra yang mewarnai langkah dalam pengambilan kebijakan publik sebagaimana kasus ideal masyarakat tahap awal perkembangan Islam, lazim dikenal masyarakat madani.⁴

Forecasting futurolog, John Naisbitt tentang kebangkitan agama dengan seperangkat nilai etika dan moral yang terkandung di dalamnya menjadi sumber inspirasi dan cerminan dalam pembangunan menjadi sebuah harapan yang semakin nyata. Masyarakat moderen, terutama di kalangan generasi muda Muslim mengalami kenaikan frekuensi komitmen moral dan menggali diskursus moral Islam yang terus menggelindingkan pengaruh dalam lingkup kehidupan yang bersifat trans-nasional. Bagi mereka, Islam membawa apa yang mereka sebut dengan “civilizing properties” yang memiliki kekuatan preventif terhadap berbagai kemungkinan-kemungkinan baru dari keterlibatan mereka dalam proses modernisasi. Realitas sosial hasil pembangunan membawa masyarakat hampa spiritualitas agama tidak saja mendorong mereka menyiapkan diri menjadi komunitas yang memiliki moral secara informal, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan ketrampilan mereka untuk berperan dalam pembangunan masyarakat sipil (*civil society*),⁵ serta keyakinan mereka bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mampu menjawab hal-hal yang bersifat transendental, yang menjadi esensi agama.⁶

Agama dengan segala ajaran yang terkandung di dalamnya merupakan identitas sosial, sumber legitimasi bagi lahirnya suatu ideologi. Kapitalisn

⁴ Lihat Nurcholih Madjid. Et.al. *Kehampaan Spiritual Masyarakat Moderen*. (Jakarta: Paramadina, 2005), 191, 316 dan 330.

⁵ Annette Haaber Ihle. Islamic Morality, Youth Culture, and Expectations of Social Mobility among Young Muslims in Northern Ghana. *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 21 No. 2, August 2008, 268-286.

⁶ Tigran Melkonyan dan Mark Pingle. Religion and Faith: A Decision Theory Perspective. *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*. Volume 5, 2009 No. 3, hal. 4

misalnya berakar dari etika agama protestan (Protestanisme) demikian pula kapitalisme Jepang berakar dari etika Budhisme Zen.⁷

Artikel ini bertujuan untuk memberikan elaborasi tentang diskursus agama dalam membangun *public civility*. Bagian awal dari artikel ini menyajikan ontologi agama, peran dan fungsi dalam kehidupan personal dan publik. Bagian kedua menyajikan nilai-nilai Islam dalam membangun keadaban publik. Nilai-nilai yang diajukan dalam sub kajian ini dikonstruksi dari pengalaman historisitas keberhasilan perjuangan Islam awal dalam membangun ideal type negara di Madina. Pada bagian lanjut disajikan konstruksi historis pembangunan ekonomi yang sarat dengan nilai-nilai keadaban publik dan menjadi rujukan masyarakat moderen dalam membangun sistem ekonomi dan moneter. Ulasan berikutnya menyajikan pengalaman sejarah redupnya *public civility*. Sejumlah faktor yang dapat dijadikan pelajaran diungkapkan dalam sub ini sebagai upaya mewujudkan harapan mayoritas masyarakat membangun *public civility*. Kesimpulan dimuat dibagian penutup artikel yang mengabstraksikan ide-ide yang ditawarkan dalam melihat relasi agama (islam) dalam membangun *public civility* secara keseluruhan.

B. Hakekat, Fungsi Dan Peran Agama

Pada hakikatnya, setiap orang memiliki fitrah beragama⁸ walaupun dalam pengumpulan sosialnya mengalami dinamika dan perkembangan yang berbeda. Agama menjadi identitas diri, termasuk kelompok yang mengakui dirinya tidak beragama (atheisme) sekalipun. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan pada Tuhan. Agama bersifat absolut, final, universal dan perenial. Emile Durkheim mendeskripsikan agama sebagai sistem keyakinan dan praktek terhadap hal-hal yang sakral, sebagai perekat sosial antara satu sama lain yang mengintegrasikan manusia ke dalam satu ikatan moral yang kolektif.⁹

Agama berfungsi membingkai pemeluknya dengan kaidah-kaidah moral agar perilaku mereka sesuai dengan ajaran moral agama yang dianutnya. Karena itu,

⁷ Lihat Masyhur Amin (ed). *Moralitas Pembangunan Perspektif Agama-Agama di Indonesia*. Yogyakarta: LKPSM bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994), hal. v.

⁸ Lihat QS. 30:31

⁹ Irwan Abdullah (eds). *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008), hal. 4.

agama menjadi sistem keyakinan yang dianut yang diwujudkan melalui tindakan-tindakan kelompok pemeluknya sebagai respons terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Landasan keyakinan keagamaan adalah pada konsep suci (*sacred*) yang dibedakan dari, atau dipertentangkan dengan yang duniawi (*profane*) dan pada yang gaib, yang menjadi lawan dari hukum-hukum alamiah (*natural law*).¹⁰

Secara sosiologis, agama adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas, yang berperan besar dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial serta memahami dan menafsirkan dunia sekitar. Agama memberikan wawasan dan cara pandang dalam mensikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan, mewujudkan kesalehan individu yang pada gilirannya melahirkan komunitas masyarakat yang memiliki keadaban yang tinggi (*high civility*).

Sebagai sumber spiritualitas, agama menghendaki pemeluknya agar memiliki pemahaman, mengamalkan dan memperjuangkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya sehingga mereka menjadi umat yang terbaik yang menyeru pada keadaban (*amrun bil ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*perbuatan biadab*).¹¹ Pada sisi lain, agama memuliakan ruang bagi terbinanya kebersamaan manusia sekaligus meruangkan kebersamaan yang saling menyapa di antara mereka. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi watak dasar manusia sebagai makhluk mada yang selalu berhasrat untuk menyempurnakan kelemahan dan kekurangan dirinya dengan membuka ruang kehadiran orang lain sebagai wadah penyempurnaan diri. Dalam konteks ini, kitapun mengenal terma masyarakat inklusif dan keberagaman inklusif.

Masyarakat inklusif dan keberagaman inklusif¹² meniscayakan ruang bagi tumbuh suburnya pluralitas sosial, budaya dan agama. Masuknya agama dalam

¹⁰ Parsudi Suparlan. *Kata Pengantar dalam Roland Robetson. Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*. (Jakarta:Rajawali Press, 1995), hal. v.

¹¹ Lihat QS. 3: 109-111

¹² Sikap keberagaman *inklusif* adalah cara pandangan (paradigma) yang sudah mampu dan mau melakukan hubungan dan kerja sama dengan pihak lain, tetapi hanya pada dan atas dasar kepentingan sosial, karena apa yang benar hanya pada dirinya sendiri. Selain sikap keberagaman inklusif, terdapat pula beberapa sikap keberagaman lain dalam kehidupan masyarakat

uang public (*public sphere*) bisa mencegah penyelewengan yang kerap dilakukan oleh berbagai kalangan untuk menjustifikasi tindakan anomali yang tidak saja bertentangan dengan nilai agama, tetapi juga membuat banyak orang menderita.

Agama sebagai *the sacred canopy* yang fungsional memiliki peran strategis dalam mencegah tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan norma agama sekaligus menjadi referensi utama nilai-nilai moral dan etika. Fungsi ini memerlukan kekuatan internal yang tumbuh dalam locus kesadaran internal (*internal locus of control*) setiap individu pemeluknya. Dengan kesadaran diri mereka menjadi agen sosial (*social agent*), konstruktor realitas (*reality constructor*) yang mampu mewujudkan liberalisasi dan humanisasi serta transformasi sosial, menegakkan serta meneguhkan *public civility*.

Proses pembiasaan diri dalam membentuk keadaban publik (*the making process of public civility*) lahir dari kesadaran individu akan pentingnya tatanan hidup bersama yang baik. Kebiasaan publik tidak akan lahir tanpa adanya kebiasaan dalam hati, yakni kebiasaan hati nurani dari setiap warga negara untuk hidup lebih beradab.¹³

Mewujudkan *public civility* harus dibangkitkan mulai dari masing-masing diri person. Setiap person tidak hanya berguna bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Karena itu, sense *public civility* harus dibangun dari kekuatan personal yang

multireligius seperti tipologi keberagamaan yang eksklusif dan ipologi keberagamaan yang pluralis. Sikap keberagamaan *pluralis* mengacu pada paradigma pemikiran yang memandang setiap agama mempunyai kebenaran dan jalan keselamatan sendiri-sendiri sehingga tidak ada alasan untuk menolak kerja sama di antara para pemeluk agama yang berbeda. Lebih jelas kajian ini dapat dirujuk dalam tulisan Budy Munawar Rachman dan Moh Shofan. Argumen Islam untuk pluralisme. (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2010), 16-19. Para penganut masing-masing agama dapat memperdalam pemahamannya sendiri atas hakekat kebenaran transendens dengan cara membuka diri terhadap kepercayaan orang lain. Pemahaman bahwa terdapat banyak cara untuk melihat dan mengungkapkan kebenaran sering merupakan titik pijak awal dari toleransi dan kerendahan hati. Hal yang serupa berlaku bagi agama sebagai unsur yang penting dari identitas budaya. Komunikasi dalam kerangka toleransi yang timbal balik memungkinkan berkembang suburnya spiritualitas, sebagaimana yang dikatakan al-Qur'an bahwa tujuan dari keragaman adalah untuk merangsang manusia agar "saling berlomba-lomba dalam kebaikan" (Soedjatmoko, *Pembangunan dan Kebebasan*. Terjemahan Atmakusumah Astraatmaja. (Jakarta: LP3ES, 1984), 32.

¹³ Lihat Nurcholis Madjid, *Kemampuan Spiritual Masyarakat Modern*. (Jakarta: Paramadina, 2005), hal. 209

pada gilirannya melembaga secara mapan dalam kehidupan sosial dan kehidupan bernegara. Tindakan destruktif yang mengarah pada pendangkalan kodrat kemanusiaan manusia seperti *eksploitasi*, *immoralitas*, dan sejenisnya tidak saja menghancurkan tatanan kehidupan sosial masyarakat suatu bangsa tetapi juga kontradiktif dengan *human nature* serta ajaran agama.

Agama sebagai sumber ajaran moral dan etika yang memberikan wawasan tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya diinjeksi sedemikian rupa dalam *mind set* setiap individu sehingga etika dan moralitas publik yang bersumber dari agama menjadi dasar bagi setiap diri dalam membangun *good and clean governance*. Agama dalam ruang publik mewariskan nilai-nilai positif yang dapat menumbuhkan kesadaran personal¹⁴ dan secara kolektif mewujudkan etika keadaban publik yang lebih kuat sebagai efek dari fungsionalisasi agama.¹⁵

C. Islam Dan Diskursus *Public Civility*

Istilah *civility* atau keadaban serumpun dengan kata peradaban. Kedua istilah tersebut dikonstruksi dari kata yang sama “adab”. Adab mengandung beberapa makna yaitu sopan santun, tingkah laku yang berakhlak dan bermoral serta budaya. Budaya yang disamakan dengan kata adab, dikonstruksi dari kata budi dan daya yang biasa dipahami sebagai olah rasionalitas manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁶

Peradaban sering juga dimaknai dengan *al madaniyah* (dari kata madinah) yang berarti kota. Kota adalah central pertama tumbuh dan berkembangnya sebuah peradaban masyarakat. Peradaban (*civilization*) salah satu bentuk tingkah laku sopan santun dalam sebuah komunitas yang dalam kenyatannya telah menjadi salah satu sebab berkembangnya kehidupan manusia.¹⁷ Masyarakat beradab, dengan demikian adalah masyarakat yang memiliki norma, akhlak dan budi (tatakrama) sebagai dasar pijakan dalam berkata dan berperilaku.

¹⁴ Lihat QS Zayyat 25; QS 95: 6 dan QS 103: 2.

¹⁵ Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. (Bandung: Mizan, 1995), 27.

¹⁶ H. Muhammad In'am Ehsa. *Percikan Filsafat Sejarah dan Peradaban Islam*. (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal. 40.

¹⁷ Kuntowijoyo. *Paradigma Islam...*, 42

Keadaban digunakan untuk merujuk pada suatu kreasi masyarakat yang "kompleks" yang diwarnai dengan norma dan akhlak yang baik dalam bidang ekonomi, pertanian, politik, dan lainnya. Keadaban merujuk pada budaya komunitas masyarakat kota (*madinah*) yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral.¹⁸ Kata *tamaddun* juga dikaitkan dengan masyarakat kota yang memiliki akhlak dan budi atau alat batin sebagai penyokong bagi kemajuan pemikiran dan pembangunan fisik.¹⁹ Kebudayaan menggambarkan semangat mendalam mengenai masyarakat yang ditandai dengan kemajuan mekanis dan teknologi menjadi *core* dari kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan direfleksikan dalam seni dan sastra serta religi sedangkan peradaban terefleksi dalam politik, ekonomi dan teknologi, seni bangunan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks.²⁰

Kemajuan peradaban yang dicapai manusia harus diwarnai oleh moralitas agama. Keduanya mempunyai hubungan yang erat dalam Islam, yang digambarkan dalam banyak ayat dalam Al Qur'an, misalnya Surah 2: 25; 95:6; 103: 2. Relasi yang erat antara iman dan perilaku moral umat Islam mengandaikan dua sisi yang saling melengkapi. Buah dari keimanan adalah munculnya keadaban dalam kehidupan personal dan publik.²¹

Keadaban dalam Islam, secara teologis, berpijak pada kesatuan atau keesaan mutlak dalam akidah. Ketinggian dalam memahami keesaan Tuhan ini memiliki pengaruh besar dalam mengangkat martabat manusia dan membebaskan masyarakatnya dari penindasan raja-raja, penguasa atau mereka yang memiliki power untuk menundukkan orang lain, dan membetulkan hubungan antara

¹⁸ M. Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. (Yogyakarta:Pustaka Book Publisher, 2009), hal. 25.

¹⁹ Lihat M. Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. (Yogyakarta:Pustaka Book Publisher, 2009). hal. 25.

²⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban...*, hal. 1.

²¹ J. Mark Halstead. Islamic values: a distinctive framework for moral education? *Journal of Moral Education* Vol. 36, No. 3, September 2007, pp. 283–296.

penguasa dengan rakyat yang diperintah serta mengarahkan pandangan kepada Allah semata-mata sebagai pencipta mahluk dan penguasa alam.²²

Antitesis dari keadaban adalah kebiadaban. Kebiadaban merujuk pada sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan disfungsi iman atas keesaan Tuhan. Mereka adalah pribadi dan masyarakat tidak tidak tercerahkan, yang digambarkan dalam fenomena etnis antropologis yang kemudian disebut sebagai masyarakat primitif.²³ Dalam tapak tilas sejarah awal kemunculan Islam di gurun Arabia, kita mendengarkan masyarakat jahiliyah, masyarakat yang telah memiliki kebudayaan yang tinggi secara seni dan sastra namun secara moral dan religi tidak tercerahkan sama sekali.

Islam mensintesisasikan pembangunan sosial, politik dan ekonomi (material) dengan moralitas dan etika agama secara berimbang. Semua aspek disebut, dalam Islam, merupakan sarana penting dalam mewujudkan gerakan transformasi sosial ekonomi yang berperadaban. Tanpa spirit nilai-nilai keadaban pembangunan dalam segala aspek hanya menjebak manusia pada munculnya ketamakan, egoisme, dan individualisme yang mencemari watak dasarnya sebagai mahluk madani dan mahluk hanief, condong pada kebenaran dan kebajikan.

Islam memugar semua bentuk praktek feodalisme, patriarki, monopoli dan monopsoni yang bertentangan dengan keadaban publik (*public civility*), serta menggantinya dengan sistem yang egaliter dan berkeadilan yang bersumber dari spirit nilai-nilai agama. Berikut dikemukakan beberapa nilai-nilai Islam yang dikedepankan dalam membangun *public civility*.

Tauhid

Tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (iman) seorang Muslim atas keesaan Tuhan. Tauhid adalah dasar kepercayaan yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitasnya. Kata tauhid menurut Hans Wehr memiliki beberapa arti di antaranya; *to be alone*. *Tauhidullah*, berarti "*to declare God to be one, to profess belief in the unity of God*". Konsep tauhid berisikan kepasrahan (*taslim*)

²² Fadli SJ. *Pasang Surut Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah*. (Malang: UIN Malang Press. 2008), hal. 27-28.

²³ M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher. *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. xiv-xv

manusia kepada Tuhannya, dalam perspektif yang lebih luas, konsep ini merefleksikan adanya kesatuan (*unity / al wibdat*), yaitu kesatuan kemanusiaan (*unit of mankind*), kesatuan penciptaan (*unit of creation*) dan kesatuan tuntunan hidup (*unity of guidance*) serta kesatuan tujuan hidup (*unit of purpose of life*).

Prinsip atas keesaan Allah memberikan pemahaman dan pengakuan adanya transendensi. Apa yang nampak dan yang tidak nampak, dalam Islam, merupakan satu kesatuan yang saling berkait kelindang. Interaksi antara keduanya berimplikasi pada kerangka epistemologis yang tidak menolak aspek fisik dan aspek metafisik. Tauhid mendasari semua aspek pembangunan dalam Islam.²⁴

Dalam politik, tauhid mendasari makna kedaulatan rakyat yang merupakan emanasi dari kedaulatan Tuhan, artinya kedaulatan rakyat adalah kepercayaan yang berada pada batas-batas kehendak Tuhan. Pada tataran filosofis umat Islam sepakat bahwa kedaulatan yang mutlak adalah milik Tuhan, Allah SWT. Namun pada tataran praktis menjadi otoritas manusia. Nilai ketauhidan ini dimaknai sebagai “nomokrasi” yakni kedaulatan yang didasarkan pada hukum dari Allah, bukan teokrasi.²⁵

Demokrasi harus diselesaikan dengan menegakkan nilai-nilai mulia dari tujuan demokrasi itu sendiri. Islam mengajukan bahwa kedaulatan rakyat dalam demokrasi adalah kedaulatan yang dibatasi oleh kedaulatan Tuhan. Kedaulatan rakyat harus dihiasi dengan nilai-nilai ketuhanan dan kebenaran dari Tuhan sehingga kehidupan perpolitikan eksis dibawah sinaran etika dan moralitas agama (Islam). Model demokrasi dalam sejarah Islam dapat dirujuk kembali dari kasus ideal masyarakat madina. Dalam piagam Madinah dapat ditemukan bagaimana nabi Muhammad menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah atas dasar prinsip demokrasi. Beliau tidak saja berhasil menyuntikkan dasar-dasar bagi sebuah negara moderen yang beradab (*civilized*

²⁴ Abu A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Terj. Muhammad al-Baqir. (Bandung: Mizan, 1990), hal. 13.

²⁵ Teokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana Tuhan diakui sebagai raja/penguasa langsung. Uraian ini dapat dilihat dalam M. Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsipnya yang dilibat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 64-65.

state), tetapi juga mengimplementasikan prinsip demokrasi yang beradab yang ditandai dengan bangunan komunikasi sosial yang rahmah, sendi-sendi *public civility*, adil dan beradab (*civilized*).²⁶

Humanisme

Manusia merupakan tokoh sentral dalam al Qur'an yang disebut dengan berbagai istilah seperti *al-insân* atau *al-nâs* (الإنسان/الناس). Selain itu, al-Qur'an menunjuk manusia secara utuh lahir batin, fisik dan non fisik, yaitu *basyar*, *insân/nâs*, *mu'min*, *muhsin*, dan *muttaqîn*. Istilah ini dapat dikategorikan dua. *Pertama*, kategori fisik ialah *basyar* dan *insân*. Sebenarnya *insân* bukan fisik tetapi dia muncul sangat erat kaitannya dengan *basyar* yang fisik. *Basyar* yang fisik itulah yang memunculkan *insân/manusia* sebagai sifat atau karakter, disebut sebagai substansi kiri. *Kedua*, kategori non fisik ialah mukmin sebagai fithrah dasar yang menjadi modal utama munculnya *ihsân* dan *taqwâ*.²⁷

Kategorisasi terma manusia dalam al Qur'an seperti disebut di atas menunjukkan tingkat martabat dan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihargai dan dijunjung tinggi martabat dan diangkat derajatnya. Kemanusiaan atau humanisme yang selama ini diklaim sebagai produk Barat tampaknya tidak memiliki pendasaran normatif. Humanisme, dalam Islam, justru menjadi tujuan dari ajaran agama itu sendiri. Perbedaan yang mendasar antara humanisme dalam Islam dan Barat terletak pada prinsip-prinsipnya yang bersumber dari agama, aturan hukum ditegakkan untuk menegakkan moral dalam kehidupan personal dan publik.²⁸

Dalam al-Qur'an surat al Hujurat/49 ayat 13 ditegaskan bahwa manusia itu secara individual sama kedudukannya dihadapan Tuhan, yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya. Faktor aksriptif seperti kesukuan, kebangsaan dan kebahasaan serta warna kulit sama sekali bukan ukuran keunggulan manusia. Dalam pidato haji wada' Rasulullah telah memperlihatkan pentingnya nilai

²⁶ Nurcholis Madjid et.al. *Kebhampaan Spiritual Masyarakat Moderen. Respond dan Transformasi Nilai-nilai Islam menuju Masyarakat Madani*. (Jakarta: Paramadina, 2005), hal. 342.

²⁷ Syarif. Pendidikan Ke-Islam-an dan Aktualisasi Karakter (Menguak Arah Pendidikan Berbasis Hikmah). *Jurnal Kajian Islam* Vol. 3. No. 2.

²⁸ J. Mark Halstead. Islamic values: a distinctive framework for moral education? *Journal of Moral Education*, Vol. 36, No. 3, September 2007, pp. 283-296

kemanusiaan ini. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pidato kemanusiaan itu, antara lain: (a). prinsip persamaan di antara sesama manusia,²⁹ (b) kesucian jiwa, harta dan darah dan kehormatan seseorang harus dilidungi; (c). Setiap manusia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan Tuhan secara pribadi; (d) tidak boleh menindas orang lain dan tidak boleh ditindas (QS. 2/279). (e) wanita dan pria memiliki hak dan kewajiban yang sama timbal balik. Prinsip-prinsip tersebut melahirkan konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara pribadi dan masyarakat dan antara yang immanen dan yang transenden.³⁰

Keadilan

Keadilan merupakan nilai penting yang menjadi sasaran pemburuan manusia (*justice hunting*). Tidak seorang pun manusia yang tidak memerlukan keadilan. Keadilan tumbuh seiring tumbuhnya kehidupan manusia, nilai yang didamba oleh setiap individu, keluarga, masyarakat dan negara. Keadilan bersifat universal, sehingga keadilan itu menembus ruang dan waktu, terus hidup dan dibutuhkan oleh manusia.

Keadilan dalam konteks keadaban publik berarti memenuhi hak dan kewajiban menurut nilai-nilai keseimbangan (*mawzūn, balanced*) dalam satu kesatuan, secara bersama-sama menuju tujuan yang sama. Keadilan dalam Islam didasarkan pada makna persamaan, yaitu persamaan dengan melihat perbedaan kualitas, kemampuan, tugas dan fungsi yang dimainkan oleh seseorang. Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan keadilan sebagaimana dinyatakan dalam surat an-Nisa ayat 135 yang memerintahkan orang yang beriman agar menjadi orang yang benar-benar menegakkan keadilan.

Di alam demokrasi, keadilan mutlak diperlukan. Demokrasi yang dilandasi oleh nilai keadilan dapat menciptakan kehidupan bernegara yang sehat dan tegak. Tanpa keadilan masyarakat akan runtuh, sekalipun kesalehan pribadi penguasanya baik. Dengan demikian keadilan adalah kunci bagi tegak atau

²⁹ Lihat QS. 49/13

³⁰ Nurcholis Madjid et.al. *Kebhampaan Spiritual Masyarakat Modern. Respond dan Transformasi Nilai-nilai Islam menuju Masyarakat Madani*. (Jakarta: Paramadina, 2005), 40.

runtuhnya suatu negara.³¹ Oleh karena itu, rasa keadilan dan upaya perealisasiannya yang dituntut oleh warga negara bersumber dari substansi, dari mana manusia tercipta. Jiwa kita yang paling dalam memiliki rasa keadilan yang menyinari kesadaran kita, dan api yang membara di hati kita mendesak kita untuk hidup dengan adil, melaksanakan keadilan dan melindungi apa yang kita pandang adil.³²

Amanah dan Tanggung Jawab

Dalam pengertiannya yang kontekstual, amanah kita pahami sebagai sebuah kepercayaan yang diemban manusia baik dalam membangun konfigurasi relasi yang baik dengan sesama manusia, dengan lingkungan alamnya dan relasinya dengan Tuhan. Posisi manusia sebagai makhluk mulia yang diberi peran sentral sebagai khalifah Allah untuk memikul amanah dalam mengelola alam, memakmurkannya demi memuaskan kebutuhan individu, keluarga dan kesejahteraan manusia secara umum serta peningkatan spiritualitasnya sebagai makhluk teomorfis.³³

Amanah berkaitan erat dengan hakikat spiritual keberagamaan dan esensi kekhalifahan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan dan kedamaian manusia sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditegaskan Allah.

Amanah memiliki akar kata yang sama dengan iman, yaitu *a-m-n*, mengandung arti damai dengan dirinya sendiri, atau merasakan tiadanya guncangan dalam diri seseorang³⁴ karena telah menunaikan amanah dengan penuh tanggung jawab. Sebaliknya, sikap tidak amanah membuat orang tidak merasa damai dan selalu merasakan keguncangan yang membuatnya tidak tenang dalam hidupnya.

³¹ Seyyed Hossein Nasr. *The Heart of Islam. Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*. terj. Nurasiha Fakhri Harahap. (Bandung: Mizan, 2003), hal. 292.

³² *Ibid.*, hal. 287.

³³ Teomorfis mengandung makna bahwa manusia diberi potensi dasar sebagai media untuk mengasah potensi tersebut secara terus menerus sehingga stamina spiritualnya mengalami peningkatan. Cara ini dapat dilakukan manusia dengan mengelola amanah melalui kegiatan moral, spiritual dan keduniaan manusia secara integratif. Lihat Nawab Heidar Naqvi. *Etika Ekonomi Sintesis Islami*. (Bandung: Mizan, 1985), 32

³⁴ M. Dawam Rahardjo, *Tafsir Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 203.

Dalam konteks kekinian dapat dianalogikan dengan keguncangan jiwa manusia moderen akibat hilangnya makna amanah sebagaimana yang dikehendaki pemiliknya, Allah. Yaitu amanah untuk menegakkan kebenaran dan menyingkirkan kebatilan. Zohar dan Marshall selanjutnya menuturkan bahwa:

Penyebab utama keguncangan dan stress manusia moderen disebabkan karena hilangnya makna. Segala sesuatu begitu cepat berubah dan terus menerus, begitu banyak rasa kepastian lama kita tak lagi dapat diterapkan, sehingga kita telah kehilangan petunjuk jalan yang hakiki. ... Dalam kehidupan pribadi, kita mengalami erosi akan kepastian moral dan religius, perubahan dalam struktur keluarga dan hubungan antarmanusia, kehilangan dan kematian orang yang kita cintai.³⁵

Kekuasaan pada dasarnya adalah amanat yang diberikan dan dilimpahkan oleh rakyat agar dijalankan dengan adil sebagaimana dinyatakan al-Qur'an [4] ayat 58,³⁶ jujur dan tidak disalahgunakan. Kekuasaan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan hanya kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan. Nabi bersabda; "*Sesungguhnya kamu semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu.*"

Di dalam nilai amanah dan tanggung jawab terdapat tuntutan perlakuan dan tindakan jujur dalam berdemokrasi. Beban amanah adalah menyampaikan dan memenuhi kepercayaan masyarakat dengan sepenuh hati dan kejujuran. Tanpa kejujuran, tanggung jawab dalam berdemokrasi akan kehilangan makna hakikatnya.

Islam, dalam konteks tanggung jawab, merupakan sebuah sistem yang terpadu dan lengkap yang melampui syarat dan kriteria negara moderen. Prinsip syura' misalnya selaras dengan prinsip demokrasi yang kini gandrung dijadikan model di alam politik moderen.³⁷

³⁵ Danah Zohar dan Ian Marshall. *Spiritual Capital dalam Dunia Bisnis*. (Bandung: Mizan, 2005), hal. 39.

³⁶ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil.

³⁷ Nurcholis Madjid. *Kebhampaan Spiritual....*, hal. 340.

E. Islam dan Transformasi Ekonomi: Kasus Ideal

Ekonomi merupakan aspek pembangunan yang memainkan peran penting, terutama dalam kaitannya dengan upaya membangun keadaban publik (*public civility*). Masyarakat yang beradab. Ekonomi menjadi indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu masyarakat. Kelimpahan atau kelesuan ekonomi suatu masyarakat membuka peluang bagi munculnya tindakan anomali, atau penyimpangan seperti kasus korupsi yang marak terjadi dewasa ini.

Korupsi sebagai fenomena sosial yang dapat mengancam kelangsungan kesejahteraan masyarakat tidak saja bertentangan dengan prinsip keadaban publik. Efek kemelaratan bagi banyak pihak ini memerlukan bantuan. Tindakan yang bertentangan dengan keadaban publik ini mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi. Secara luas beberapa dampak yang dimunculkan perilaku *ghuluw*³⁸, di antaranya: *pertama*, tidak terdistribusinya secara merata kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Fakta yang kini terjadi, dipertontonkan oleh para penguasa di negara kita ini tidak saja cermin tidak dimilikinya keadaban, tetapi juga melanggar spirit ekonomi al Qur'an yang menganjurkan supaya harta itu beredar secara luas, tidak tertahan di tangan segelintir orang.³⁹

Kedua, infrastruktur yang berjalan secara tidak berimbang sebagaimana. Maraknya kasus yang disebabkan kualitas infrastruktur seperti pembangunan jembatan dan sebagainya merupakan dampak langsung dari praktek yang merugikan publik. Dampak lebih lanjut adalah rendahnya mobilitas ekonomi masyarakat sekaligus menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang krusial yang dihadapi oleh hampir semua negara berkembang. Pengangguran terjadi disebabkan karena tidak tersedianya lapangan

³⁸ Ghuluw artinya berlaku khianat dalam harta rampasan perang, zakat, mengambil bagian sebelum dibagi oleh imam. Makna yang identik dengan kata korupsi adalah *risywah* menyangkut kasus suap menyuap yang dilakukan antara individu yang satu dengan individu lain dengan imbalan tertentu guna memperoleh pekerjaan atau jabatan. Risywah juga mengandung arti manipulasi, pungli, mark up dan pencurian dana publik secara terselubung dan bersembunyi dibalik dalil-dalil konstitusi, dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar secara tidak sah dari apa yang seharusnya diperoleh menurut kadar dan derajat pekerjaan seseorang. (Musa Asy' arie. Menuju Masyarakat Anti Korupsi. (Jakarta:Depkominfo, 2005), 29.

³⁹ Lihat QS. Al Hasyar: 7

kerja dan minimnya income negara. Kondisi ini dapat menyebabkan munculnya kriminalitas seperti Penjaja seks koersial, pembunuhan, perampokan dan sejenisnya.⁴⁰

Dalam aspek ekonomi, Islam telah menunjukkan konsistensi dan komitmen melakukan transformasi sisten ekonmi tiran dalam sejarah kehidupan masyarakat Quraisy. Islam kritis terhadap bangunan sistem ekonomi yang tidak berkeadilan, monopolistik, individualistik dan perdagangan yang penuh dengan kecurangan.⁴¹

Dari sisi pemikiran, Islam menjadi sumber inspirasi lahirnya transformasi sistem ekonomi dunia. Adam Smith (1776 M), misalnya terinspirasi oleh teori ekonomi Abu Ubaidah dalam karyanya *al-Ammal* (838 M).⁴² karya ini menjadi cikal bakal lahirnya *the Wealth of Nation* Adam Smith. Ia membandingkan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang berbeda dan terbelakang dengan masyarakat ekonomi maju. Masyarakat primitif melakukan aktifitas berburu untuk pemenuhan kebutuhannya. Berbeda dari itu, masyarakat yang memiliki tingkat keadaban maju memenuhi mata pencaharian utama melalui aktivitas berdagang seperti masyarakat Arab kala itu.

Adam Smith tidak ragu menyebut masyarakat tersebut sebagai masyarakat pimpinan Nabi Muhammad SAW dan khulafaurrasyidin *Mohamet and bis immediate successors*.⁴³ Dalam hal pasar, Adam Smith terinspirasi oleh Ibnu Rusdi yang berpendapat bahwa dinamika dan pergerakan pasar sangat dipengaruhi atau diatur oleh *invisible hand* (tangan tak terlihat)⁴⁴ yang menjadi cikal bakal lahirnya system ekonomi pasar atau ekonomi liberal.⁴⁵

⁴⁰ Musa Asy ' arie. *Menuju Masyarakat...* 332-333.

⁴¹ Eko Prasetyo, *Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal dari Teori menuju Gerakan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002), hal. 16-17.

⁴² Abdul Hadi Nashir, *Sistem Ekonomi Syariah sebagai Pencerahan Peradaban*" <http://permodalanbmt.com/?p=79>. On line diakses, 05 Juli 2009.

⁴³ Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2003), hal. 50.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 50

⁴⁵ Sistem ekonomi liberal adalah sebuah system ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu atau unit-unit ekonomi untuk melakukan yang terbaik bagi kepentingan mereka masing-masing. Sistem ekonomi pasar ini juga disebut system ekonomi kapitalis karena system ini mengandalkan capital yang dikuasai pihak swasta. Sistem ini, menurut

Bagi Smith pasar akan mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*) jika pelaku sama-sama berangkat dari satu kesadaran moral bahwa aktivitas ekonomi yang mereka lakukan memiliki nilai-nilai humanis yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Kesadaran ini memiliki kekuatan preventif untuk menghindari terjadinya malpraktek dalam aktivitas ekonomi.

Selain Smith, penguasa Inggris, Raja Offa (774 M) yang mencetak koin emas yang merupakan *direct copy* dari Dinar Islam lengkap dengan tulisan Arabnya. Dalam koin emas itu, Raja Offa mempertahankan kalimat *Laa Ilaaha Illallah Muhammad Rasulullah* dan menambah dua buah salib kecil sebagai isyarat akidah raja Offa.⁴⁶ Islam telah membangun sebuah sistem ekonomi yang memiliki tingkat keadaban yang tinggi. Sistem ekonomi Islam telah mengilhami lahirnya ekonomi dan sistem moneter dunia.⁴⁷ Sistem moneter emas (dinar), misalnya telah memberikan kesejahteraan riil bagi komunitas dunia. Sejak perang dunia I standar emas ini diganti dengan dollar AS. Pasca perang dunia II, persoalan moneter menjadi sebuah system dunia, dengan dimulainya system Bretton Woods, yang ditandai lahirnya IMF dan Bank Dunia sejak tahun 1944.⁴⁸

Dalam bidang tata buku (akuntansi), misalnya al Khawarizmi adalah orang pertama yang menemukan konsep-konsep al jabar, yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah praktis, seperti pembagian harta warisan, perkara hukum (*lawsuit*) dan transaksi-transaksi dagang yang kemudian ditetapkan dalam masyarakat muslim. Ia telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pengembangan matematika modern dan secara langsung telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan akuntansi sebagai ilmu yang sangat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi pihak-pihak yang

Adam Smith tidak membutuhkan perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun, semuanya diserahkan kepada pasar, dan suatu *invisible hand* akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan, di mana dalam posisi keseimbangan semua sumber daya dimanfaatkan sepenuhnya. Pasar mengalami distorsi jika pemerintah terlalu jauh memberikan intervensi, karena itu, peran pemerintah harus diminimalisir sedemikian kecil, bahkan, jika memungkinkan dihilangkan sama sekali.

⁴⁷ A.M. Saefuddin (ed). *Dinar Emas Krisis Moneter*. (Jakarta, PIRAC, SEM Institut dan Infid, Cet. 1, 2001), 38.

⁴⁸ AM. Saifuddin. *Dinar Emas...*, 39

berkepentingan (*stakeholders*), melalui pengambilan keputusan ekonomi. Ilmu inilah kemudian yang dipelajari Leonardo da Pisa dan disebarakan di Eropa.⁴⁹

F. Redupnya *Public civility*: Belajar dari Pengalaman Sejarah

Meskipun peradaban Islam telah berhasil memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan peradaban Barat, namun hukum sejarah menunjukkan fakta lain. Peradaban Islam mulai mengalami masa-masa melankolis sehingga tidak mampu bertahan di atas porosnya sendiri. Peradaban Islam yang telah mengukir epos perjuangan nabi dalam membentuk masyarakat yang memiliki keadaban dan egaliter menjadi komunitas tidak memiliki keadaban. Beberapa alasan dikonstatasir sehubungan dengan ketidak mampuan masyarakat Islam mempertahankan keadaban.

Pertama, lenyapnya berbagai cabang ilmu-ilmu *aqliyah* dari tradisi keilmuan Islam. Ilmu-ilmu *aqliyah* mengalami transmisi ke dunia Eropa dikembangkan sehingga mendorong terjadinya pencerahan (*aufklarung/keadaban*). *Kedua*, umat Islam meninggalkan tradisi berfikir rasional menuju pola berfikir tradisional-konservatif yang berciri irrasional, taqlid eksklusive, dan pasif. Agama diartikan secara fatalistik dalam pengertian bahwa nasib manusia telah ditetapkan secara mutlak oleh kehendak Tuhan, yaitu dalam Qadla dan qadr-Nya. Manusi dalam pengertian ini tidak dapat berbuat lain kecuali bersikap menerima dan pasrah kepada kehendak Tuhan (*Jabbariyah*).⁵⁰

Kemudian *ketiga*, Islam tereduksi, dalam arti bahwa Islam seolah-olah hanya berurusan dengan syari'ah atau fiqh saja. Islam menjadi asing, sinarnya tertutup oleh kabut pemahaman sempit umat Islam sendiri (*al Islam mahjubun bil muslimin*), sehingga mereka menjadi komunitas marjinal dalam segala hal. *Keempat*, Pemimpin agama tidak dapat mengikuti derap lajunya sains dan teknologi yang dikembangkan umat pada masa sebelumnya. Agama yang diserukan oleh para pemimpinnya, adalah agama *an sich* yang tidak kontekstual dengan dinamika dan

⁴⁹ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Berhadapan...*,46

⁵⁰ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Berhadapan...*47.

perkembangan yang terjadi. Pada bagian lain, tingkah laku pemimpin yang tidak lagi amanah dan tidak menempatkan urusan pada ahlinya.⁵¹

Kelima, kerusakan moral. Aspek ini sangat mendasar mewarnai perilaku umat Islam. kerusakan moral tidak saja mencerminkan kepribadian yang tidak memiliki keadaban, tetapi juga menjadi pilar kerusakan sebuah bangsa. Tatkala penguasa masyarakat dan bangsa bangsa tidak memperhatikan keadaban yang dapat ditiru oleh publik, maka ia adalah pemimpin yang tidak memiliki kepribadian yang beradab.⁵² Hancurnya suatu bangsa, sebagaimana disinyalir Allah dalam QS. 11:116-117,⁵³ sangat bergantung pada keadaban seorang pemimpin.

Keenam, ketidakadilan dan kezaliman. Rapuhnya penegakkan keadilan baik di depan hukum (*equality before the law*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan ekonomi (*economic justice*) memiliki potensi kuat yang meruntuhkan keadaban. Keadilan hukum, ekonomi, sosial dan sebagainya yang memihak pada kepentingan kelompok dan golongan tertentu, menindas kelompok yang lemah, maka pada kondisi ini tidak saja mencerminkan kebiadaban, melainkan pula pada saat yang sama meruntuhkan sendi kehidupan personal dan publik. QS. al-Qashash [28:4].⁵⁴

Prinsip-prinsip Islam seperti kebebasan, tanggungjawab, kebersamaan dan kesejahteraan dan keadilan menjadi bagian dari prinsip ekonomi dalam Islam, yang mencerminkan kebutuhan manusia secara universal. Karena itu, *public civility* yang diserukan Islam adalah *public civility* yang bersifat universal pula.

⁵¹ Nurcholis Madjid, et al. *Kehampaan Spiritual....*, 342.

⁵² Muhammad In'am Ehsa, *Perikan Filsafat....*54.

⁵³ Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan dimuka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan, Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebajikan.

⁵⁴ Sungguh firauun telah meninggalkan dirinya di muka bumi dan menjadikan penduduknya berkasta-kasta, dengan menindas satu golongan di antara mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sungguh, ia termasuk orang yang berbuat kerusakan.

G. Penutup

Agama sebagai *the sacred canopy* yang fungsional memainkan peran penting tidak saja dalam ruang personal tetapi juga dalam ruang publik. Agama dalam ruang personal dan publik berfungsi memproteksi tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan norma agama. Tujuannya, sebagaimana tujuan syari'at Islam (*maqasid asy syari'ah*) yaitu menjaga dan memelihara agama dan jiwa manusia. Agama menjadi referensi utama etika dan moral. Fungsionalisasi nilai ini sangat ditentukan oleh kekuatan internal yang tumbuh dalam locus kesadaran (*internal locus of control*) setiap individu pemeluknya. Mereka memainkan peran ganda sebagai agen sosial (*social agent*) dan konstruktor realitas (*reality constructor*) yang bertugas membangun realitas jaringan sosial yang memiliki keadaban diri dan keadaban umum (*personal and public civility*).

Peran penting agama dalam mewujudkan *public civility* pada kenyataannya bukan merupakan sebuah wacana, tetapi secara historis agama, terutama Islam telah menunjukkan secara konkrit bagaimana Islam melakukan transformasi kehidupan masyarakat yang tidak tercerahkan (*dark*) menjadi komunitas masyarakat yang tercerahkan (*enlightment/civility*).^c Bahkan, Islam secara historis menunjukkan kasus ideal model negara yang komunitasnya memegang teguh *public civility*.

Atas dasar itu, keinginan untuk mewujudkan publik civility dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air ini haruslah dibawah sinaran agama. Menafikan intervensi nilai etika dan moral bersumber dari agama, sama maknanya dengan membiarkan negara porak-poranda tanpa arah.

Agama menjadi instrument *moral force* yang mampu memformat pembangunan masyarakat yang memiliki keadaban publik yang tinggi. Tentu, keadaban publik menuntut prasyarat moral yaitu dengan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama, menjadikan nilai-nilai agama fungsional dalam ruang personal dan publik dengan sendirinya menegakkan sendi-sendi agama dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Sebaliknya, mengabaikan nilai-nilai agama seperti nilai tauhid, nilai humanis, nilai persamaan, keadilan dan amanah sama dengan membangun kehidupan bangsa dan negara di atas puing yang rapuh, sehingga sedikit saja goyah maka semuanya hancur lebur. Kenyataan

ini ditunjukkan dalam berbagai sejarah masa lalu bangsa-bangsa yang besar yang berakhir dengan kehancuran tragis akibat meninggalkan nilai etika dan moral yang bersumber dari agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Ko se. 1999. The journey from the secular to the sacred: Experiences of native British converts to Islam. *Social Compass*, 46(3).
- Abdullah, Irwan (eds). 2008. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar.
- al Qardhawi, Yusuf. 1995. *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam* Terj. Jakarta: Rabbani Press.
- al-Maududi, Abu A'la, 1990. *Khilafah dan Kerajaan*, Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan.
- Amin, Masyhur (ed). 1994. *Moralitas Pembangunan Perspektif Agama-Agama di Indonesia*. Yogyakarta: LKPSM bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Asy'arie, Musa. 2005. *Menuju Masyarakat Anti Korupsi*. Jakarta: Depkominfo.
- Azhary, M. Tahir. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsipnya yang dilibat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ehsa, H. Muhammad In'am. 2011. *Percikan Filsafat Sejarah dan Peradaban Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Fronidizi, Risieri. 2001. *Filsafat Nilai*. Terj. Cut Ananta Wijaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi Nashir, Abdul. 2009. "Sistem Ekonomi Syariah sebagai Pencerahan Peradaban" <http://permodalanbmt.com/?p=79>. On line diakses, 05 Juli.
- Hafiduddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Halstead, J. Mark. 2007. "Islamic values: a distinctive framework for moral education?". *Journal of Moral Education* Vol. 36, No. 3, September.

- Ihle, Annette Haaber. 2008. Islamic Morality, Youth Culture, and Expectations of Social Mobility among Young Muslims in Northern Ghana. *Journal of Muslim Minority Affairs*. Vol. 28, No. 2, Augustus.
- Karim, M. Abdul. 2009. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Kuntowijoyo. 1995. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholis et.al. 2005. *Kehampaan Spiritual Masyarakat Moderen. Respond dan Transformasi Nilai-nilai Islam menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Paramadina.
- Melkonyan, Tigran dan Mark Pingle. 2009. Religion and Faith: A Decision Theory Perspective. *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*. Volume 5, No. 3.
- Naqvi, Nawab Heidar. 1985. *Etika Ekonomi Sintesis Islami*. Bandung: Mizan.
- Nasr, Seyyed Hossein. 2003. *The Heart of Islam. Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*. terj. Nurasiha Fakhri Harahap. Bandung: Mizan.
- Prasetyo, Eko. 2002. *Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal dari Teori menuju Gerakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachman, Budy Munawar dan Moh Shofan. 2010. *Argumen Islam untuk Pluralisme*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Rahardjo, M. Dawam. 1996. *Tafsir Kunci* (Jakarta: Paramadina).
- Saefuddin, A.M. (ed). 2001. *Dinar Emas Krisis Moneter*. Jakarta: PIRAC, SEM Institut dan Infid, Cet. 1.
- SJ, Fadli. 2008. *Pasang Surut Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah*. Malang: UIN Malang Press.
- Soedjatmoko, 1984. *Pembangunan dan Kebebasan*. Terjemahan Atmakusumah Astraatmaja. Jakarta: LP3ES.
- Soutar, Louise. 2010. British female converts to Islam: choosing Islam as a rejection of individualism. *Language and Intercultural Communication*. Vol. 10, No. 1, February.
- Suparlan, Parsudi. 1995. Kata Pengantar dalam Roland Robetson. *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Press.

Tamara, M. Nasir dan Elza Peldi Taher. 1996. *Agama dan Dialog Antar Peradaban*.
Jakarta: Paramadina.

Zohar, Danah dan Ian Marshall. 2005. *Spiritual Capital dalam Dunia Bisnis*.
Bandung: Mizan.